

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pedoman adalah tiga paket Undang-Undang tentang keuangan negara yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh setiap kementerian negara dan lembaga pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan ketertiban administrasi dan ketaatan asas dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas adalah ditandai sebagai opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam laporan keuangan, terdapat unsur-unsur yang menyusun laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah belanja. Menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja diklasifikasikan menjadi delapan jenis antara lain Belanja Barang, Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Lain-Lain. Jenis belanja yang ingin difokuskan pembahasannya oleh penulis adalah Belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Pusat atau Daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial yang mungkin terjadi serta menaikkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan di bidang sosial milik pemerintah. Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial yang dikepalai oleh Kepala Dinas bertugas untuk membantu Bupati dalam urusan di bidang sosial milik pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial membelanjakan anggaran agar dapat mencapai kinerja yang lebih optimal. Sebagai entitas pelaporan, Dinas Sosial

wajib membuat laporan keuangan yang didalamnya tercantum pos-pos akuntansi belanja dan beban. Dinas Sosial diharuskan mempunyai kinerja yang baik dan mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tercipta akuntansi pemerintah yang optimal. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mengklasifikasikan, mengukur, mencatat, dan menyajikan pos-pos sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau penerapan sistem pelaporan keuangan Dinas Sosial terutama pada bagian Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan Sosial menjadi salah satu pos yang penting bagi Dinas Sosial mengingat tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis akan membahas permasalahan tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulis tersebut antara lain:

1. Bagaimana penganggaran atas Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di masa pandemi Covid-19?
3. Apa yang menyebabkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai dengan anggaran?

4. Apakah penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam menulis karya tulis tugas akhir, antara lain

1. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Belanja Bantuan Sosial di lingkungan pemerintahan;
2. Mengetahui pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
3. Mengetahui penyebab pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai dengan anggaran;
4. Mengetahui penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam KTTA ini secara umum akan menjabarkan tentang penerapan akuntansi belanja dan beban pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Untuk pembahasan topik dalam KTTA lebih spesifik, penulis akan menjabarkan hanya pada Belanja Bantuan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait penerapan akuntansi belanja bantuan sosial di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga berharap karya tulis ini dapat menjadi literatur atau pustaka acuan untuk penulisan karya tulis di masa mendatang yang berhubungan dengan akuntansi belanja bantuan sosial.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan atas akuntansi pemerintah mengenai belanja bantuan sosial, yang kemudian dapat menerapkannya saat bekerja di sektor keuangan pemerintah. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah kota/kabupaten dalam meninjau pelaksanaan belanja bantuan sosial agar di masa mendatang pelaksanaannya dapat lebih baik serta sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir antara lain.

1. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2012), studi pustaka merupakan referensi, kajian teoritis, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan norma, nilai, dan budaya yang berkembang di situasi sosial yang menjadi objek penelitian.

Sehubungan dengan ini, penulis akan mengumpulkan, membaca, dan menelaah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan akuntansi belanja bantuan sosial, serta berita maupun sumber lainnya sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ini.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi, pengetahuan, maupun suatu pikiran dengan melakukan tanya jawab dan diringkas menjadi suatu kesimpulan atas topik tertentu.

Metode ini dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi mengenai topik yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Metode ini akan menjadi alternatif bila dibutuhkan oleh penulis saat melakukan penyusunan karya tulis. Mengingat kondisi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, penulis dapat melakukan wawancara secara daring menggunakan telepon atau via chatting.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir. Gambaran umum tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan dan pembatasan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Landasan teori tersebut dapat bersumber dari buku, peraturan yang berlaku, dan undang-undang yang berlaku. Bab ini

menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku pada objek penelitian

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Pada bab ini penulis juga akan memberikan gambaran umum mengenai objek yang diteliti. Gambaran umum tersebut terdiri dari profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi. Selain itu, bab ini berisi pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir yakni mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi belanja bantuan sosial di Dinas Sosial kabupaten Temanggung berdasarkan metode penelitian yang telah dipilih dan data yang tersedia.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah dipaparkan pada seluruh bab sebelumnya. Penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi objek agar praktik akuntansi atas belanja bantuan sosial tersebut menjadi lebih baik.